

## Pemkab Pastikan Efisiensi Tak Ganggu Program Prioritas

**TENGGARONG** – Anggaran belanja di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2025 akan mengalami perampingan. Ini menyusul diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan penghematan anggaran nasional sebesar Rp306,7 triliun. Dari jumlah tersebut, pemangkasan terbesar terjadi pada anggaran kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun, serta transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) langsung bergerak menindaklanjuti kebijakan ini. Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, memastikan bahwa efisiensi anggaran ini dilakukan dengan cermat tanpa mengorbankan program-program prioritas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. "Kami telah melakukan serangkaian rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang juga dihadiri langsung oleh Bupati Edi Damansyah. Fokus utama kami adalah memangkas anggaran yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Sunggono saat ditemui, Kamis (13/2).

Dari hasil pembahasan tersebut, Pemkab Kukar menyepakati pemangkasan anggaran dalam beberapa sektor, di antaranya perjalanan dinas yang dipangkas hingga 60 persen, kegiatan rapat koordinasi yang dinilai kurang relevan berkurang hingga 75 persen, serta belanja bahan cetak dan alat tulis kantor yang juga ditekan sebesar 60 persen.

Selain itu, belanja untuk kursus bagi aparatur sipil negara (ASN) yang bukan merupakan kewajiban pemerintah juga dikurangi sebesar 50 persen. Adapun pengadaan dan perawatan kendaraan dinas, pengadaan baju dinas, serta belanja perangkat lunak (*software*) akan direduksi secara signifikan atau bahkan ditunda jika tidak dianggap mendesak. "Kurang lebih itu yang sudah kami rasionalisasi. Bupati juga menekankan bahwa efisiensi ini tidak boleh mengganggu program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti bantuan rumah ibadah dan proyek pembangunan strategis," lanjutnya.

Sunggono memastikan, proyek-proyek besar yang sudah direncanakan seperti pembangunan Pasar Tangga Arung dan Rumah Sakit Muara Badak tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi ini. Selain itu, belanja pegawai juga tetap terjamin karena alokasi APBD Kukar 2025 masih dalam batas aman sesuai ketentuan. "Belanja pegawai tetap aman, dan kami pastikan tidak ada gangguan terhadap pelayanan publik yang menjadi prioritas," tuturnya. **(qi/far)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Pemkab Pastikan Efisiensi Tak Ganggu Program Prioritas, 15/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.



